

AGAMA DAN KEKUASAAN

(Studi Pada Gerakan Sosial Keagamaan Warga Al-Khairiyah Cilegon-Banten)

Rafiudin

Program Studi Manajemen Informatika
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah Cilegon
Jalan H. Enggus Arja No. 1 Link. Citangkil Cilegon 42441
Email: averus.rafi@gmail.com

Abstract

Al-Khairiyah, which is in the form of a Community Organization (ORMAS), runs organizational programs that focus on the donation program as a superior program in helping Madrasas. This study uses a qualitative method by analyzing organizational movements ranging from social assistance towards a practical political level. The ideological movement based on religious values towards the realm of power creates a problem formulation regarding the relationship between religion and power. The attachment that exists as a logical consequence is the aim of this study. The institutional peak through which the mass organization Al-Khairiyah has been dominated by its achievements is due to the ability of the general chairman, H. Ali Mujahidin in managing the organization in a relatively short period of time starting in 2016 is a typical indication of a Social Movement as a result of research.

Keywords: Religion, Power, Social Movement

Abstrak

Al-Khairiyah yang berbentuk Organisasi Masyarakat (ORMAS) menjalankan program-program organisasi yang fokus pada program donasi sebagai program unggulan dalam membantu Madrasah. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan menganalisa pergerakan organisasi mulai dari bantuan sosial menuju ke arah tingkat politik praktis. Gerakan yang secara ideologi berbasis nilai-nilai keagamaan menuju ranah kekuasaan membuat sebuah rumusan masalah mengenai hubungan antara agama dan kekuasaan. Keterikatan yang ada sebagai sebuah konsekuensi logis menjadi tujuan dalam penelitian ini. Puncak institusional yang dilalui organisasi massa Al-Khairiyah dengan didominasi pencapaiannya karena kemampuan ketua umum, H. Ali Mujahidin dalam mengelola organisasi dalam waktu yang relatif singkat mulai tahun 2016 adalah indikasi yang khas dari sebuah Gerakan Sosial dijadikan sebagai hasil penelitian.

Kata Kunci: Agama, Kekuasaan, Gerakan sosial

A. Pendahuluan

Kondisi beragama kurang mendapat iklim yang baik sejak zaman pemerintahan kolonial. Penanaman nilai-nilai moral terancam oleh situasi lingkungan yang merusak. Dari segi Aqidah Islam, masyarakat melihat praktik-praktik syirik dalam berbagai upacara keagamaan yang memang diperlukan untuk membangun

kewibawaan Negara yang dilakukan lewat ritus-ritus mitosisasi. Al-Khairiyah sebagai Organisasi Masyarakat melakukan usaha untuk menghindarkan masyarakat dari praktik-praktik yang salah dalam beragama. Usaha yang dilakukan berupa Gerakan Sosial dengan fokus pada gerakan donasi kepada Madrasah-Madrasah sebagai benteng pertahanan dalam pemurnian (purifikasi) Aqidah.

Harapan formal terhadap agama dan umat beragama terutama adalah mengatasi dampak dan eksek modernisasi. Umat Islam dituntut untuk dapat bisa menyesuaikan diri terhadap proses modernisasi. Di sini agama ditempatkan pada posisi defensif, yaitu harus melayani tujuan dengan cara-cara modernisasi. Apabila agama tidak mampu menyesuaikan diri dan bisa berfungsi efektif dalam mengatasi dampak dan eksek modernisasi, maka tentunya agama akan diperkirakan tidak lagi relevan dan ditinggalkan pada masa yang akan datang.¹

Al-Khairiyah sebagai organisasi keagamaan memandang perlunya suatu usaha untuk mengendalikan eksek modernisasi dengan memperkuat Madrasah sebagai tempat transformasi nilai-nilai keagamaan yang dinilai masih baik sampai saat ini. Usaha-usaha dalam bentuk Gerakan Sosial ini akan dikaji sesuai dengan porsi Al-Khairiyah sebagai Organisasi Keagamaan yang eksis sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Agama dan Kekuasaan, hubungan timbal balik antara Gerakan Sosial Keagamaan dengan pergumulan politik praktis di kota Cilegon. Lokus penelitian diadakan di pusat gerakan, yaitu Kompleks AL - Khairiyah yang berlokasi Jl. H. Enggus Arja No. 1 Citangkil, Cilegon - Banten telp (0254) 7813947, E-Mail: pengurusbesar.alkhairiyah@gmail.com Website: <http://alkhairiyah.or.id> Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 2020.

Penelitian yang dilakukan menggunakan Metode Kualitatif dengan mencari fakta-fakta di lapangan untuk dijadikan sumber penelitian sehingga mencapai tingkat validitas data yang dihimpun. Penulis melakukan tahap pengumpulan data mulai dari pustaka, observasi, sampai kepada analisis data dan interpretasi data yang diperoleh. Data tentang perilaku warga al-Khairiyah yang diperoleh dari lapangan, ditulis ulang dalam uraian yang lengkap. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang hasil pengamatan dan wawancara serta studi dokumentasi. Reduksi data dapat memberikan kode bagi aspek-aspek yang dibutuhkan.

C. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian yang dilakukan oleh Maftuh (2015) dengan judul “Lembaga Pendidikan Al-Khairiyah di Banten (1916-1942) - Pendekatan Sejarah Sosial”

¹ Raharjo, M. Dawam (1999), *Intelektual Intelegensia dan perilaku politik Bangsa – Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, h. 380-381

penelitian dalam bentuk disertasi ini fokus pada tinjauan Al-Khairiyah sebagai lembaga pendidikan modern di Banten. Tampaknya penelitian tentang konsep agama dan kekuasaan dalam gerakan sosial keagamaan warga al-Khairiyah belum ada yang melakukan penelitian padahal konsep agama dan kekuasaan pada gerakan sosial keagamaan tersebut sangat erat dan merekat ketika dikaitkan dengan perjuangan bangsa sebelum kemerdekaan.

Penelitian pada gerakan sosial keagamaan warga al-Khairiyah di Kota Cilegon akan dirumuskan secara khusus konsep agama dan kekuasaan sejalan dengan NKRI. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor sejarah bahwa warga al-Khairiyah di Cilegon adalah salah satu penggerak kemerdekaan Republik Indonesia dan pemersatu rakyat Cilegon dalam membela bangsa dan negara dari kezaliman para penjajah di negeri ini. Dengan demikian diharapkan masyarakat menjadi paham bahwa konsep agama dan kekuasaan adalah alat pemersatu bangsa. Masyarakat dengan demikian lebih cerdas lagi dalam menerima informasi yang tidak tepat berkaitan dengan konsep negara dan kekuasaan yang didengungkan oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan kejayaan Indonesia.

D. Kajian Teori Agama dan Kekuasaan

Ada dua tokoh besar yang membuat grand theory utamanya dalam bidang sosiologi yaitu George Ritzer dan Thomas Kuhn. Keduanya memiliki andil yang sangat besar dalam mengembangkan teori-teori sosiologi. Dalam penelitian ini grand theory kedua tokoh tersebut akan diintegrasikan untuk menyempurnakan kajian yang akan dilakukan. Dalam pandangan Ritzer sosiologi dianggap sebagai ilmu berparadigma majemuk (a multiple paradigm science) sehingga harus dikaji secara holistik dalam hal ini Fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Sedangkan Kuhn melihat ada peluang untuk menambahkan grand theory tersebut dengan teori kesatuan sosial.

1. Fakta Sosial (Social Fact)

Pada abad ke-19 seorang sosiolog Perancis, Emile Durkheim memberikan pandangan tentang fakta sosial untuk pertama kalinya. Hal itu diungkapkan dalam karyanya *The Rules of Sociological Method and Suicide* dalam karyanya disebutkan bahwa sosiologi memiliki perbedaan yang signifikan baik dengan psikologi maupun filsafat. Setiap orang tidak hanya dapat dipahami dengan ciri-ciri fisik dan lingkungan dimana ia berada, karena menurut Durkheim manusia memiliki fakta sendiri yang dapat diungkap dengan faktor luar sebagai pengontrol, berupa struktur, norma, budaya, dan nilai sosial yang bersifat memaksa. Kehidupan sosial setiap orang memiliki hukum dan akibat yang khas, manusia dipandangnya memiliki fakta sosial selain fakta-fakta lain yang bersifat fisik dan psikis. Fakta sosial tersebut berpijak pada struktur dan pranata sosial.

Ada tiga karakteristik fakta sosial, yaitu:

1. Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Dasarnya adalah kesadaran yang dipengaruhi faktor luar, baik dalam berfikir, bertindak, dan berperasaan.

2. Fakta sosial bersifat memaksa individu.
3. Fakta sosial bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam masyarakat disebut dengan sifat kolektif.

Penganut paradigma ini tak hanya memusatkan perhatian pada fenomena fakta sosial ini tetapi juga pada pengaruhnya terhadap pikiran dan tindakan individu. Dalam hal ini struktur bisa memaksa. Dengan kata lain terdapat sesuatu di luar diri yang mampu memaksa diri seseorang untuk melakukan sesuatu agar dapat berperilaku sesuai dengan apa yang ada di luar dirinya. Jadi, perilaku seseorang dapat dikontrol. Dalam hal ini struktur bisa memaksa (Norma, aturan, nilai-nilai, kondisi, dan situasi, serta alat pengendalian sosial lainnya).

Fakta Sosial menurut Durkheim terdiri atas:

1. Bentuk Material. Fakta sosial dalam bentuk material dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti. Ekspresi kekuatan moral sebagai bentuk non material adalah kekuatan di luar individu juga dapat ikut andil memaksa individu untuk melakukan suatu tindakan.
2. Bentuk non material. Fakta sosial dalam bentuk ini hanya muncul dari kesadaran manusia yang dibatasi oleh fikiran dan akan terlihat dalam bentuk ekspresi ketika sedang berinteraksi secara sempurna.

2. Definisi Sosial (social definition)

Definisi sosial berpijak pada proses berpikir manusia. Aksi dan interaksi sosial terjadi karena kemauan manusianya itu sendiri. Definisi sosial erat kaitannya dengan Max Weber menurutnya sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Tindakan sosial itu diartikan sebagai tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.

Paradigma definisi sosial bercirikan adanya interaksi dengan norma sehingga menimbulkan makna dan perilaku yang bersifat *continue*. Selain itu dalam paradigma ini selalu melihat hal-hal yang khusus. Model yang mempersatukan penganut paradigma ini adalah karya Max Weber tentang tindakan sosial. Karyanya membantu menimbulkan minat di kalangan penganut paradigma ini dalam mempelajari cara aktor mendefinisikan situasi sosial mereka dan dalam mempelajari pengaruh definisi sosial ini terhadap tindakan dan integrasi berikutnya.

Definisi sosial tidak berpijak pada fakta sosial yang objektif, yaitu struktur dan pranata sosial, melainkan pada proses berpikir manusia. Dalam merancang dan mendefinisikan arti aksi dan interaksi sosial, manusia diposisikan sebagai pelaku yang bebas dan bertanggungjawab, dengan kata lain, aksi dan interaksi sosial terjadi karena kemauan manusianya itu sendiri. Sehingga tindakan sosial tidak berpangkal pada struktur-struktur sosial, namun pada definisi bersama yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Contoh penting paradigma definisi sosial ini digunakan oleh Max Weber. Konsep sosiologinya adalah *verstehen* atau pemahaman mendalam yang diharapkan dihasilkan oleh sosiologi. Tindakan manusia harus diuraikan berdasarkan perspektif subjektif, dan peneliti sosiologi harus menempatkan dirinya pada alam pikiran orang yang dipelajarinya. Pemikiran Weber dalam tulisannya yang berjudul: *Inti Semangat Kapitalisme dan Inti Semangat Calvinisme*. Ia menunjukkan kemiripan antara nilai-nilai kapitalisme (struktur sosial) dengan cara orang menafsirkan nilai-nilai agama tertentu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dipahami dari cara subyek atau manusia berpikir, dan bukan nilai-nilai sosial sebagai kenyataan objektif.

Pemikiran individu dalam masyarakat mempengaruhi struktur yang ada dalam masyarakat. Sedangkan menurut Max Weber ialah tindakan individu selama tindakan tersebut mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Dalam hal ini struktur sosial dan pranata sosial keduanya malah membantu tindakan manusia yang penuh arti dan makna.

Tindakan sosial diartikan sebagai tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial.

Beberapa teori besar yang masuk dalam definisi sosial adalah etnometodologi, eksistensialisme, teori tindakan (action theory), teori interaksionisme simbolik (symbolic interactionism) dan teori fenomenologi (phenomenology).

3. Tindakan Sosial

Tindakan sosial adalah tindakan yang diarahkan atau memperhitungkan orang lain, dan tindakan yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Tindakan sosial dapat berupa tindakan sosial Rasional Instrumental dengan rumusan: (tujuan + proses = sesuai), ada yang berupa tindakan tradisional, yaitu yang bersifat non rasional, tindakan karena kebiasaan, atau tindakan tanpa refleksi sadar, dan ada juga yang berupa tindakan afektif yaitu tindakan yang didominasi oleh perasaan atau emosi.

4. Interaksi Sosial

Adanya hubungan timbal balik antar individu atau kelompok adalah cerminan adanya interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Setidaknya menurut Hall ada empat jarak ruang dalam interaksi sosial, yaitu: jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik.

Berikut adalah beberapa syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu:

- a. Kontak Sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kontak sosial dimaknai sebagai interaksi atau hubungan fisik dan non fisik, ketika bersalaman (berjabat tangan) terjadilah hubungan fisik atau ketika menelfon terjadilah hubungan non fisik.

Kontak sosial dapat mengarah kepada kerja sama atau bertentangan sesuai dengan tujuan kedua belah pihak yang melakukan hubungan.

- b. Komunikasi. Tujuan bersama yang tercapai akibat dari proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain dapat dikatakan sebagai sebuah komunikasi. Ada tiga tahap yang harus dilalui dalam komunikasi, yaitu: 1) Encoding. Tahap di mana komunikator membentuk kata atau kalimat serta gambar yang dipilih dengan tujuan mudah dipakai oleh komunikan sebagai penerima pesan. 2) Penyampaian. Tahap di mana komunikator mengirim pesan baik berupa tulisan atau lisan dan dapat juga berupa penggabungan dari keduanya. 3) Decoding. Tahap komunikan mencerna pesan yang disampaikan. Pemahaman yang diperoleh sangat tergantung pada pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki komunikan.

5. Bentuk Interaksi Sosial

Bentuk-bentuk interaksi sosial yang berkaitan dengan proses asosiatif dapat terbagi atas bentuk kerja sama, akomodasi, dan asimilasi. Kerja sama merupakan suatu usaha bersama individu dengan individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Akomodasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan, di mana terjadi keseimbangan dalam interaksi antara individu-individu atau kelompok-kelompok manusia berkaitan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Usaha-usaha itu dilakukan untuk mencapai suatu kestabilan. Sedangkan asimilasi merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok.

Bentuk interaksi yang berkaitan dengan proses disosiatif ini dapat terbagi atas bentuk persaingan, kontraversi, dan pertentangan. Persaingan merupakan suatu proses sosial, di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Bentuk kontraversi merupakan bentuk interaksi sosial yang sifatnya berada antara persaingan dan pertentangan. Sedangkan pertentangan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Dalam tahapan proses-proses asosiatif dan disosiatif Mark L. Knapp menjelaskan tahapan interaksi sosial untuk mendekati dan untuk merenggangkan. Tahapan untuk mendekati meliputi cara memulai (*initiating*), menjajaki (*experimenting*), meningkatkan (*intensifying*), menyatupadukan (*integrating*) dan mempertalikan (*bonding*). Sedangkan tahapan untuk merenggangkan meliputi membeda-bedakan (*differentiating*), membatasi (*circumscribing*), memacetkan (*stagnating*), menghindari (*avoiding*), serta memutuskan (*terminating*).

6. Perilaku Sosial (Social Behavior)

Manusia berfikir dan berperilaku berdasarkan stimulus yang datang dari luar. Psikolog, B.F. Skinner memaparkan bahwa masalah pokok sosiologi adalah perilaku individu yang tak dipikirkan. Orang akan menghindari suatu perilaku karena adanya hukuman dan akan melakukan suatu perilaku tertentu yang diberikan stimulus berupa hadiah (rewards).

Teori penting yang masuk perilaku sosial adalah teori sosiologi behaviorial dan teori pertukaran. Teori sosiologi behaviorial memusatkan perhatiannya pada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor, khususnya yang dialami sekarang oleh si aktor. Sedangkan teori pertukaran dibangun dengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial.

Fokus utama perilaku sosial adalah bahwa setiap manusia memiliki orientasi tertentu dalam berperilaku, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perubahan perilaku individu adalah semata-mata karena adanya proses interaksi antar individu dan hubungan individu dengan lingkungannya sendiri.

7. Definisi Agama (Religion)

Agama adalah bagian dari kehidupan manusia, bagi yang menyikapi secara permisi, yaitu golongan yang mengakui agama atau difensif yaitu yang menjauhi agama bahkan menentangnya. Adanya definisi dan konsep tergantung kepada apa yang dipelajari dan dialami dengan segala aspek yang ada. Tidak ada satu definisi yang mampu menangkap kedalaman raung lingkup makna agama, namun sangat besar sumbangannya terhadap pemahaman mutakhir setiap orang. Max Muller berpendapat bahwa definisi agama secara lengkap belum tercapai karena penelitian terhadap agama terus dilakukan dan para ahli masih menyelidiki asal-usul agama.² Pernyataan Muller memberi ruang yang lebih luas lagi tentang pendefinisian agama. Data-data empirik para peneliti kembali diuji coba dan terus melahirkan definisi-definisi yang bervariasi. Setiap objek penelitian seolah-olah melahirkan format baru dalam agama. Namun definisi Muller yang mengesampingkan adanya ritus dan elemen berupa penyembahan kepada yang ghaib dapat diartikan terlalu berani. Hal ini karena berdasarkan sejak lahirnya agama-agama di dunia, sebuah agama tidak akan muncul tanpa keduanya. Pada karya-karya berikutnya, akhirnya Muller menyadari pendapatnya yang ekstrim dan membuat pudar esensi agama dengan memunculkan definisi baru bahwa agama terbentuk dalam pikiran sebagai sesuatu yang tak tampak yang dapat mempengaruhi karakter moral dari seorang manusia. Definisi ini, Muller mengakui bahwa penting adanya kekuatan ghaib dan keberadaan ritus di mana manusia menundukkan karakter moralnya dalam bentuk

² Lihat Bakhtiar, Amsal (2007), *Filsafat Agama*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Perasada, hal 14.

ketakutan, rasa terima kasih, cinta, rasa bersalah, semuanya adalah esensial dari agama.

Sebuah definisi yang dianggap paling mewakili definisi agama adalah yang dikatakan oleh Edward Burnett Tylor bahwa agama adalah kepercayaan kepada wujud spiritual (*the belief in spiritual beings*). Berbeda lagi dengan Emile Burnaof yang berpendapat bahwa agama adalah ibadah, dan ibadah itu merupakan amaliah campuran. Ada upaya akal dalam amaliahnya digunakan untuk mengenal dan mengakui adanya kekuatan Yang Agung serta adanya upaya hati dalam amaliahnya yang digunakan untuk sarana memohon kekuatan tersebut.³

Pakar-pakar sosiologi terkenal lainnya seperti Emile Durkheim, Marx, dan Weber juga mengemukakan pendapat yang berbeda dengan menegaskan bahwa agama adalah alam gaib (*fundamentally an illusion*) yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia sendiri.

Geertz mengungkapkan bahwa agama merupakan sistem lambang yang berfungsi menegaskan berbagai perasaan dan motivasi yang kuat, berjangkauan luas dan abadi pada manusia dengan merumuskan berbagai konsep mengenai keteraturan umum konsistensi dan dengan menyelubungi konsepsi-konsepsi ini dengan sejenis tuangan faktualitas sehingga perasaa-perasaan dan motivasi-motivasi itu secara unik tampak realistik. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Durkheim yang menekankan peribadatan kolektif meskipun membiarkan kemungkinan-kemungkinan lain tetap terbuka, definisi yang dikemukakanya berhasil menampilkan secara jelas berbagai kegiatan politik atau moral kedalam cakupan gejala keagamaan dimana peribadatan-peribadatan kolektif memainkan peranan penting dan para pelakunya. Konsep-konsep mereka mengenai keteraturan umum eksistensi menyebabkan perasaan dan motivasi mereka secara unik tampak realistik gerakan-gerakan nasionalis, komunis dan fasis dengan mudah dimasukan.⁴

Definisi-definisi tersebut secara umum dapat diketahui bahwa agama tidak lepas dari pengalaman seseorang atau sekelompok orang tentang ruang spiritual yang sarat mistik, meskipun dalam memahaminya ada andil kinerja akal. Ruang-ruang spiritual yang beragam tersebutlah yang memunculkan sebuah keyakinan untuk memuja objek tertentu yang biasa disebut Tuhan karena dianggap memiliki kekuatan yang tidak dimiliki objek lain.

8. Definisi Kekuasaan (Power)

Kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan cara mempengaruhi tingkah laku orang-orang lain sesuai dengan tujuan-tujuan sang aktor. Michael Foucault, seorang filsuf pelopor strukturalisme mengungkapkan bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.

Teori Foucault dinilai sebagai wacana pengetahuan yang terstruktur, utamanya mengenai aturan dan praktik. Ia berpendapat bahwa konsep kekuasaan

³ Lihat Kahmad, Dadang (2011), *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Ilmu, hal.25

⁴ Lihat Betty R. Schaf (1995), *Kajian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana, hal.32

telah berubah dibandingkan dengan abad ke-19. Ciri perubahan tersebut terapat pada yang dulu brutal sekarang lebih dinamis dan ditujukan untuk kepentingan bersama, sehingga kekuasaan dapat ditemukan di mana-mana dan menjadi milik bersama. Kekuasaan pada akhirnya terlihat hanya sebatas strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu yang melahirkan banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya serta senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan pada akhirnya bertautan dengan pengetahuan sehingga memberi warna baru. Foucault mengaitkan kekuasaan dengan pengetahuan dan menganalisa bahwa kekuasaan memproduksi pengetahuan di segala bidang yang dipersembahkan untuk kekuasaan. Ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi.

Foucault dengan tandas mengungkapkan bahwa kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun kekuasaan yang dipahami masyarakat yaitu kekuasaan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain yang dianggapnya tidak sesuai. Bagi Foucault kekuasaan sangat orisinal. Kekuasaan lebih pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil.

Kekuasaan juga sarat dengan keuntungan sepihak baik baik secara pribadi maupun kelompok pendukung. Penguasa memiliki kemampuan memainkan strategi untuk melanggengkan kekuasaan dan peranan sosial yang paling vital dalam suatu masyarakat. Terutama jika masyarakat yang dijadikan objek adalah masyarakat primitif. Jika para penguasa memiliki kelimpahan harta dihadapan dengan kelompok yang primitif. Penguasa yang banyak modal dihadapkan dengan kelompok yang butuh modal maka akan terjadi ketergantungan yang mendatangkan sikap kepatuhan.⁵

Jenis-jenis kekuasaan yang umum diketahui terbagai kepada beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) eksekutif, yaitu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) legislatif, yaitu kekuasaan yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan serta mengawasi roda pemerintahan, (c) yudikatif, yaitu kekuasaan yang berwenang menyelesaikan persoalan hukum dan didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin *law enforcement*/ pelaksanaan hukum.⁶

E. Hubungan Agama dengan Kekuasaan

Di Indonesia terdapat berbagai macam fenomena yang mengindikasikan adanya hubungan yang erat antara agama dan kekuasaan. Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia diawali dengan kekuatan tokoh-tokoh agama yang menentang segala bentuk penjajahan yang melahirkan kesengsaraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

⁵ Martin, Roderick (1995), *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press, h. 98.

⁶ Hidayat, Imam (2009), *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA press, 29

Ajaran agama yang menentang kedzaliman dalam bentuk penjajahan membuat para tokoh agama memahami bahwa selama kekuasaan masih di pegang oleh para penjajah maka kesengsaraan bangsa tidak akan pernah berakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari peralihan kekuasaan Belanda ke Jepang yang keduanya sama-sama merugikan dan menyengsarakan bangsa.

Kesadaran para tokoh agama mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial keagamaan di antara lain yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Padri (1803-1838), Pangeran Diponegoro dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Jawa (1825-1830), dan Ki Wasid di Cilegon Banten yang terkenal dengan sebutan Geger Cilegon (1888), serta di Aceh juga terdapat gerakan suami istri yaitu Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien dalam beberapa kali peperangan (1899).

Gerakan-gerakan tersebut semakin lama semakin menyebar secara merata di seluruh penjuru negeri sehingga bangsa ini pada akhirnya mampu merebut kemerdekaan dengan menguasai secara penuh kekayaan yang ada di bumi pertiwi. Gerakan sosial keagamaanlah yang menjadi sebab utama diraihnya kekuasaan dari tangan para penjajah.

Agama dan kekuasaan menjadi satu kesatuan dalam sejarah panjang perjuangan kemerdekaan bahkan ketika mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agama pun selalu dijadikan alat pemersatu untuk terwujudnya kekuasaan yang langgeng di tangan rakyat, sebagai penguasa tertinggi berupa mandat yang diberikan kepada presiden.

Robert Misel dalam bukunya yang berjudul *Teori Pergerakan Sosial* mendefinisikan Gerakan Sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat.⁷ Sedangkan Mansoer Fakih menyatakan bahwa Gerakan Sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha mengubah struktur maupun nilai sosial.⁸

Makna gerakan sosial secara umum adalah sebuah gerakan yang tidak harus terlembagakan dan memiliki ciri dasar yaitu adanya perubahan, baik pada masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan gerakan sosial keagamaan adalah sebuah gerakan yang sama, bedanya didasari oleh semangat keagamaan yang diperkuat oleh adanya doktrin-doktrin agama pada setiap individu yang terlibat dalam gerakan tersebut.

Susanto mengadakan kajian tentang gerakan sosial dari barat yaitu Michael Useem yang dinilainya fokus pada tindakan kolektif terorganisasi. Useem membatasi pada perubahan sosial sedangkan Mc Charthy dan Mayer Zald merinci pada pendistribusian yang bernilai secara sosial, kemudian Charles Tilly melengkapi dengan perubahan melalui interaksi yang mengandung persetujuan dan berkelanjutan di

⁷ Misel, Robert (2004), *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta : Resist Book , hal.6-7.

⁸ Lihat Zubir, Zaiyardam (2002), *Radikalisme Kaum Terpinggir : Studi Tentang Ideologi, Isu , Strategi Dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta : Insist Press , hal. Xxvii.

antara warga negara dan negara.⁹ Agama sebagai sebuah institusi yang dianut mayoritas oleh sebuah warga negara menggambarkan sebuah perbedaan khas dalam sebuah gerakan baik yang menunjukkan pertentangan terhadap kebijakan pemerintah maupun yang menunjukkan dukungan. Agama akhir-akhir ini lebih menonjolkan bentuk-bentuk gerakan terhadap aturan yang diberlakukan dalam sebuah negara yang dianggap bertentangan dengan dasar ajaran agama yang dianut oleh pemeluk agama tertentu.

Kajian lain tentang gerakan sosial adalah yang dilakukan Sudarsono yang menitikberatkan pada gerakan yang lahir dari inisiatif masyarakat sebagai sebuah tuntutan akan perubahan dalam institusi, kebijakan, atau struktur pemerintah. Tuntutan tersebut muncul karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan harapan masyarakat yang ada atau malah sangat bertentangan. Tinjauan ini menyimpulkan bahwa gerakan sosial lahir dari masyarakat sehingga kekuarangan apapun pada pemerintah dijadikan tuntutan. Sudarsono juga mengkaji bahwa gerakan sosial dapat terjadi dari gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Statemen tersebut sebelumnya adalah gerakan anti pemerintah, tapi tidak selalu gerakan sosial muncul dari masyarakat bahkan bisa jadi munculnya disebabkan dari hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.¹⁰ Tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini yang sering terlibat dalam gerakan anti pemerintah atau pro pemerintah dilakukan oleh warga negara yang mengatasnamakan agama tertentu atau simbol-simbol keagamaan. Agama di satu sisi dijadikan sebagai perisai pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi, dan sesekali agama dijadikan sebagai sebuah senjata untuk melakukan tuntutan-tuntutan tertentu kepada pemerintah.

Fadillah Putra dkk mengkaji bahwa pendapat Anthony Giddens lebih mewakili dalam pendefinisian gerakan sosial karena berbasis pada kebersamaan dalam tindakan kolektif (*action collective*) untuk kepentingan bersama di luar ruang lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Baginya tidak harus sebuah lembaga besar yang mewakili sebuah gerakan. Sekumpulan orang-orang tertentu dengan tujuan perubahan tertentu yang ditujukan kepada institusi tertentu, utamanya adalah pemerintah sudah dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan sosial.

F. Gerakan Sosial Al-Khairiyah

Menurut Denny JA setidaknya ada tiga kondisi penting yang membuka peluang timbulnya gerakan sosial. *Pertama*, kesempatan. Negara-negara demokratis dan moderat terbiasa membuka peluang timbulnya gerakan sosial, sementara negara yang otoriter bisanya tidak membuka peluang sekecil apapun pada gerakan sosial karena dianggap membahayakan atau setidaknya merugikan. *Kedua*, Ketidakpuasan. Regulasi pemerintah yang lebih memihak pada kelompok tertentu bisa jadi membuat rasa ketidakpuasan terhadap regulasi tersebut dan menimbulkan gerakan sosial. *ketiga*,

⁹ Susanto, Astrid S dan Sunarto (1998), *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad Ke Dua Puluh Satu*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal.21

¹⁰ Sudarsono, Juwono (ed) (1976), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Jakarta: Gramedia, hal. 24-25.

tokoh penggerak atau pemimpin. Seorang tokoh yang kharismatik dan memiliki banyak pengikut biasanya adalah mereka yang mampu membangun organisasi dan banyak memberi inspirasi kepada para pengikutnya. Tokoh seperti itu mampu membuat gerakan sosial.

John Lofland bahkan mampu menangkap gejala-gejala munculnya gerakan sosial melalui kualitas gelombang sebuah elemen publik, utamanya elemen-elemen baru. Jika gelombangnya semakin kuat dan membesar baik terencana atau tidak maka dapat dipastikan, itulah gerakan sosial. Lofland menegaskan setidaknya ada dua hal yang dapat memastikan sebuah gerakan sosial. *Pertama*, usia gerakan antara 5 sampai 8 tahun yang dapat disimpulkan berusia hanya seumur jagung. *Kedua*, gerakan sosial diawali dari gerakan kekerasan atau hanya sekedar protes yang biasa disebut gerakan pinggiran, gerakan awal, atau embrio gerakan.

Dari dua tokoh tersebut dapat diketahui bahwa sebuah gerakan sosial setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya tokoh penggerak
2. Adanya kekerasan, protes, atau ketidakpuasan
3. Adanya gelombang elemen publik yang semakin membesar
4. Elemen publik bergerak hanya seumur jagung
5. Muncul di negara demokratis dan modern

Demikian ciri-ciri utama sebuah gerakan sosial. Gerakan yang berorientasi pada adanya perubahan ke arah yang diinginkan. Elemen publik yang berkelompok-kelompok acap kali lahir membawa beragam keinginan yang terekspresikan dalam sebuah gerakan-gerakan kecil yang bisa menjadi gerakan sosial

Pada awal tahun 1970 terdapat beberapa gerakan sosial yang dominan pada tatanan teoritis, yaitu neo-marxisme, perilaku kolektif interaksionis, dan struktural fungsional, serta neo-utilitarian rasionalis. Akhir-akhir ini terdapat juga pendekatan yang berorientasi pada hermeneutika dan juga pendekatan tindakan sosial. berikut ini adalah beberapa penjabaran beberapa pendekatan yang menunjang dalam mengkonseptualisasikan hal-hal baru dalam gerakan sosial:

1. Pendekatan melalui Teori Marxist dan Neo-Marxisme

Dalam pandangan marxist, gerakan sosial adalah reaksi (perlawanan) karena adanya eksploitasi dan dominasi kelas/kaum/kelompok yang satu atas yang lain. hal tersebut lebih dikenal dengan istilah kontradiksi struktural (sebuah ekspresi dari struktur kelas yang kontradiktif).

Sebuah analisis yang dilakukan oleh Mansoer Fakhri tentang gerakan sosial, marxisme lebih menitikberatkan pada gerakan kelas buruh baik di pabrik maupun di sawah atau ladang. Kelas buruh seolah dijadikan pusat perubahan sedangkan gerakan non-kelas tidak termasuk di dalamnya. Hal tersebut dapat dikatakan hanya untuk menghindari generalisasi. Tapi, pandangan Fakhri yang mendudukan gerakan lain sebagai gerakan superstruktur bukan sebuah pengklasifikasian. Namun lebih pada pandangan, yaitu adanya gerakan utama (basic) yang berkaitan erat dengan masalah ekonomi. Aspek lain jika muncul dalam sebuah gerakan, semata-mata hanya untuk

memperkuat gerakan utama yang sangat esensial yaitu ekonomi. Gerakan-gerakan lain di bidang pendidikan, kultur, politik bahkan ideologi sekalipun intinya adalah untuk mengukuhkan kelangsungan ekonomi.¹¹

2. Pendekatan Interaksionisme

Inti dari pandangan interaksionisme adalah mempelajari perilaku kolektif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa individu dan sekelompok orang bertindak berdasarkan pemahaman dan eksperimen bersama. Dalam pendekatan interaksionisme gerakan sosial dimaknai sebagai ekspresi kolektif untuk merekonstruksi situasi sosial atau untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial yang baru.¹²

Pendekatan Interaksionis untuk studi Gerakan Sosial dinilai tidak berhasil mengembangkan paradigma teoritis yang memadai. Pendekatan ini di satu sisi menekankan pada aspek sosial-psikologis dari aksi kolektif seperti emosi, perasaan solidaritas, perilaku ekspresif dan komunikasi, tapi di sisi lain menekankan pada kemunculan gerakan sosial di dalam proses relasi dan interaksi yang terus berjalan.

3. Pendekatan Fungsionalisme Struktural

Pendekatan fungsionalisme struktural adalah pendekatan yang pertama yang sering digunakan dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial. Dalam fungsionalisme struktural para peneliti dapat mempelajari struktur masyarakat tanpa perlu mengetahui fungsinya begitu juga sebaliknya. Fungsionalisme kemasyarakatan fokus dalam memperhatikan struktur sosial dan institusi masyarakat secara luas, hubungannya dan pengaruhnya terhadap anggota masyarakat.

Pendekatan fungsionalisme struktural terbagi dalam tiga bagian, yaitu: a. Masyarakat Massa yang menempatkan individu teratomisasi. Karena tercabut dari akarnya akibat perubahan sosial yang cepat, urbanisasi dan hilangnya ikatan tradisional, dan terisolasi dari relasi kelompok, maka individu dalam masyarakat massa adalah bebas dan cenderung berpartisipasi dalam jenis kelompok sosial baru. b. Tekanan Struktural yang menekankan pada ketidakseimbangan dari sistem sosial. utamanya antara nilai dengan praktik dan disfungsi elemen dengan kelangsungan sistem. Semua memicu ketidakseimbangan sosial dan memicu ketegangan struktural, sehingga berakhir dengan gerakan sosial. c. Deprivasi Relatif yang berupa tekanan sosial psikologis berupa perasaan subjektif. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan dapat memicu timbulnya ketidakpuasan dan frustrasi sehingga menyebabkan gerakan sosial.

4. Pendekatan Gerakan Sosial Baru (New Movement Social)

Ada sebuah semboyan dalam pendekatan gerakan sosial baru yang berkembang sejak pertengahan tahun 1960-an, yaitu ada banyak alternatif (there are

¹¹ Lihat Fakhri, Mansoer, *Op-Cit*, hal.51.

¹² Outhwaite, William Outhwaite (2008), *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Edisi ke-2*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal.784.

many alternative). Menurut Pulungan dan Abimanyu didukung dengan pendapat Laclau dan Mouffe bahwa pendekatan gerakan sosial baru adalah sebagai pencarian alternatif dari prinsip-prinsip, strategi, taktik, aksi, dan ideologi atas kejumudan dari pendekatan marxist yang cenderung fokus pada masalah perjuangan kelas. Karena adanya dikotomi kelas borjuis dan proletar. Pergerakannya juga fokus pada masalah ekonomi karena dunia pada saat itu sedang hangat-hangatnya terpana dengan industrialisasi.¹³

Gerakan Sosial Baru dalam pandangan beberapa tokoh cenderung bervariasi pemaknaannya, seperti Claus Offe yang menganggapnya sebagai institusi masyarakat sipil yang dipolitisasi, Alberto Melluci yang menganggapnya sebagai cara baru memahami dunia, Jean. L. Cochan yang menganggapnya sebagai sebuah tuntutan yang tidak bisa dinegosiasikan, dan Ulrich Beck yang menganggapnya sebagai upaya mengkristalisasikan pengalaman dan persoalan baru yang dialami dan dihadapi bersama.

Semua pendapat para ahli tentang gerakan sosial baru mengkrucut pada pemaknaan bahwa dunia menginginkan hal baru sebagai alternatif atas ketidakpuasan dengan yang sudah ada dan optimis akan adanya sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat di kemudian hari. Dunia tidak bisa dibatasi oleh satu dimensi yang selama itu terasa mengganggu perasaan yaitu dimensi ekonomi semata. Setiap orang bergerak dan bekerja hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hidup manusia yang sebenarnya.

Gerakan Sosial baru diletakkan kedalam dua Perspektif, yaitu: *Pertama*, sebagai ekspresi rasionalisasi komunikasi yang mempertanyakan Validasi pola kehidupan dunia. *Kedua*, sebagai gerakan defensive yang menentang dominasi ekonomi. Paradigma Gerakan Sosial baru bertumpu pada dua klaim utama yaitu: *Pertama*, Peralihan industrial ekonomi ke post industrial ekonomi. *Kedua*, Keunikan. Kalau gerakan tradisional yaitu marxist menekankan pada gerakan ekonomi material seperti gerakan buruh, maka gerakan sosial baru menekankan pada non ekonomi material.

5. Pendekatan Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilization)

Dalam pandangan pendekatan Mobilisasi Sumber Daya (MSD), gerakan sosial dinilai timbul karena adanya penyakit sosial. Suatu pendapat yang sangat kontroversi dengan pandangan lain yang menilai gerakan sosial adalah akibat dari adanya penindasan dan isolasi dari masyarakat. Sumber pendukung lain yang menyebabkan adanya gerakan sosial dalam pandangan MSD adalah adanya tekanan organisasi yang efektif dan ideologi.

Proses demokrasi lahir dari adanya gerakan sosial yaitu gerakan perjuangan hak-hak sipil, gerakan anti kolonial dan rasial, feminisme, dan gerakan hak asasi manusia. Tekanan dan kekecewaan tidak dapat menjelaskan kemunculan gerakan sosial, tapi gerakan sosial justru yang menjadi fokus ketegangan dan ketidakpuasan.

¹³ Fakhri, Mansoer (1996), *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , hal.46.

Di negara-negara dunia ketiga, kehadiran gerakan sosial baru dan mobilisasi sumber daya memberikan pengaruh yang sangat besar sebagai pendukung munculnya masyarakat sipil. Gerakan sosial tidak lagi didasari oleh kesadaran kelas dan ideologi, tapi sudah didasari oleh identitas dan kesadaran terhadap persoalan yang lebih luas seperti gerakan perempuan, gerakan anti nuklir, gerakan LGBT, dsb. Mobilisasi sumber daya dalam pandangan Fuentes dan Gunder Frank adalah akar rumput munculnya demokrasi yang bersifat sosialis dan anti kolonialisme, serta mendukung perjuangan rakyat dalam menentang penindasan dan berupaya bertahan hidup dan mempunyai identitas.¹⁴

6. Pendekatan Contentious Politics

McAdam dalam bukunya *Political Process And The Development Of Black Insurgency*, mengidentifikasi bahwa terdapat empat kelemahan pada mekanisme teori-teori diatas, diantaranya, Pertama, Mekanisme-mekanisme tersebut terlalu statis dan tidak bersifat dinamis. Kedua, Mekanisme-mekanisme tersebut lebih relevan untuk menjelaskan Gerakan Sosial dalam bentuk tunggal dengan cakupan yang relative kecil sehingga tidak mencukupi untuk menjelaskan fenomena ketegangan politik yang terjadi pada suatu Gerakan Sosial dengan cakupan yang cukup besar dan luas. Ketiga, mekanisme-mekanisme tersebut muncul dalam konteks yang relatif terbuka di Amerika, dengan organisasi Gerakan Sosial yang relatif besar dan banyak secara kuantitas dibandingkan Negara-negara selatan dimana Organisasi Gerakan Sosial-nya lebih sedikit dan lebih tertutup. Keempat, mekanisme-mekanisme tersebut lebih memfokuskan kepada asal-asal gerakan daripada fase-fase perkembangannya.¹⁵

Pada tahun 1995 McAdam, Tarrow dan Tilly bertemu dan mencoba berkolaborasi mengintegrasikan serangkaian seri-seri diskusi dan seminar menyerap pendapat dan kritik dari akademis Gerakan Sosial mengenai konsep yang telah ada dan juga konsep *Contentious Politics* yang akan mereka ajukan. Dan di Tahun 2001, karya mereka *Dynamics of Contentious* dipublikasikan. Dalam karya mereka tersebut, mereka menawarkan pendekatan yang sangat dinamis dalam menganalisa rangkaian besar peristiwa-peristiwa Gerakan, baik Gerakan sosial baru, Revolusi, Nasionalisme, maupun Demokratisasi di manapun terjadi.

Dalam buku tersebut, komponen mekanisme dan proses seperti struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi dan sebagainya dijadikan sebagai subjek. Bukan objek. Dengan kata lain, komponen-komponen tersebut dijadikan sebagai kata kerja, bukan kata benda.

7. Pendekatan Agen Perubahan Modern

Pendekatan agen perubahan modern adalah pendekatan dari perilaku sehari-hari orang biasa yang seringkali dianggap tidak mengubah sesuatu apapun, tapi justru

¹⁴ Haynes, Jeyf (2000), *Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.27.

¹⁵ Lihat Situmorang, Abdul Wahab, *Op-Cit*, hal.23-24.

membentuk ulang perilaku masyarakat. Ada pertentangan antara perilaku dan struktur. Dalam agen perubahan modern kehidupan kolektif, kelas, dan gerakan perubahan tidak dijadikan landasan lagi. hal itu digambarkan oleh Buckley dalam karyanya, *Sosiology and Modren System Theory* (1967).

Pendekatan agen perubahan dapat diterjemahkan ke dalam enam ciri, yaitu:

- a. Menilai bahwa Masyarakat akan terus mengalami perubahan
- b. Perubahan yang dimaksud bersifat alami dari dalam diri setiap individu
- c. Perubahan pada individu menyebabkan kekuatan agen perubahan
- d. Perjuangan setiap individu adalah cikal bakal dalam pencapaian perubahan berupa arah dan tujuan masing-masing.
- e. Tindakan alamiah individu kerap tidak sejalan dengan struktur yang menghasilkan pertentangan.
- f. Pertukaran tindakan sebagai aksi dan reaksi antara kreativitas agen dan kemampuan struktur.

Agama di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Kemerdekaan Indonesia lahir dari adanya Gerakan Sosial Keagamaan di seluruh penjuru Nusantara. Melemahnya kualitas keagamaan pada bangsa Indonesia akan menyebabkan lemahnya kekuatan bangsa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Problem bangsa Indonesia saat ini sebagai negara berkembang adalah mulai berkurangnya pemahaman keagamaan pada generasi muda bangsa. Kekhawatiran Nigel Barber tentang sebuah keniscayaan yang akan terjadi baik di negara-negara maju maupun berkembang, bahwa sebagian besar orang akan menjadi atheis. Pada saatnya nanti, orang lebih mengutamakan kondisi finansial dari pada agamanya. Agama, paling lambat akan punah tahun 2041 mendatang.¹⁶ Punahnya sebuah agama bagi bangsa yang memiliki sejarah kemerdekaan yang didukung oleh adanya umat beragama maka mengindikasikan akan hilangnya bangsa Indonesia seiring dengan punahnya agama.

Pandangan tersebut perlu disikapi kaum muslimin dengan penelusuran fakta-fakta sejarah peradaban Islam yang mengalami pasang surut. Mulai dari kondisi masyarakat pada jaman Pra Nabi Muhammad, zaman Nabi, *kebulafaurasyidin*, Dinasti Bani Umayyah, Dinasti Bani Abbasyiah dan seterusnya hingga zaman sekarang. Al-Khairiyah sebagai salah satu gerakan sosial keagamaan mengedepankan tumbuh kembangnya pemahaman keagamaan dan keterlibatan langsung lulusan Al-Khairiyah dalam mendukung kemerdekaan NKRI dan mengisi kemerdekaan sebagai bangsa yang berperan aktif dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Pandangan yang selama ini dikembangkan adalah pandangan yang bertolak belakang dengan sejarah perjuangan yang nyata sehingga sesama anak bangsa saling curiga. Ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang semakin berkurang pemahaman agamanya dan dimanfaatkan oleh oknum bangsa yang ingin mencoba memecah belah kekuatan bangsa yang sedang terus berusaha menjadi bangsa yang besar kelas dunia.

¹⁶ Lihat Qorib, Muhammad, *Nyawa Agama tak Terhingga*, Suara Muhammadiyah, Edisi No.19 TH KE-98, 1-15 Oktober 2013, hal.26

Pemerintahan Bani Umayyah merupakan zaman Qur'ani, kepasrahan, dan iman. Syiria merupakan markas dan tempat lahirnya pemerintahan tersebut. Pada masa itu Syiria didominasi oleh kaum muslimin yang bukan bangsa Arab.¹⁷ Syiria yang sekarang mengalami kecamuk perebutan kekuasaan dulunya adalah sebuah pemerintahan Islam yang kuat dan berdiri kokoh menjadi pemimpin umat Islam di dunia. Daulah Abbasiyah merupakan zaman Arabisme murni, sebuah daulah bercorak Persia yang berbahasa Arab tapi berpikiran internasional yang membuat revolusi peradaban dan pemikiran Islam. Ironisnya pada Daulah inilah tercatat dalam sejarah orang-orang alawiyin, para pengikut imam Ali lebih banyak menderita di bawah penindasan Bani Abbas dibanding penderitaan yang mereka alami karena tindakan-tindakan Bani Umayyah.

Zaman keemasan Islam terjadi dalam kurun waktu 800 M sampai 1100 M. Sekitar 200 tahun terhitung dari mulai diturunkannya wahyu yang pertama kali ke Nabi Muhammad Saw. pada tahun 609 M.¹⁸ Dalam versi lain tercatat kurun waktu yang lebih panjang, yaitu sebuah kurun waktu kejayaan Dinasti Abbasiyah mulai dari 750 M sampai 1258 M. Pada saat itu Islam berkembang dengan pesatnya meliputi wilayah-wilayah yang sangat luas dengan peradaban dan kebudayaan yang maju dan tinggi.

Di bidang ilmu tasawuf ada tokoh seperti Ibnu Arabi dan Abu Mansur Al-Hallaj. Di bidang filsafat ada Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Kindi. Bahkan lahir pula seorang tokoh yang memiliki banyak horizon dengan segudang spesialisasi, yaitu Al-Ghazali.¹⁹ Di bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial ada seperti Al-Mas'ud, Jabir Ibn Hayyan dan Ar-Razi. Di bidang ilmu syariat ada tokoh seperti Imam Malik, Imam Syafei, Ahmad bin Hambal. Di bidang ilmu ushuluddin ada tokoh seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Wasil bin Atha. Digambarkan pula pada waktu itu Eropa dan Amerika sedang dalam kemunduran, bahkan pada saat ilmuan muslim sedang meneliti di laboratorium, raja Eropa baru belajar mengeja namanya sendiri.²⁰ Eropa mengalami kemunduran dalam kurun waktu, tahun 476 M sampai 1500 M.

Di Banten pada tahun 1916 lahir dua lembaga pendidikan Islam yaitu Mathlaul Anwar di Pandeglang, Banten dan Al-Khairiyah di Citangkil, Banten.²¹ Semangat Al-Khairiyah adalah menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari keburukan (ta'muruna bil ma'ruf, watanhauna 'anil munkar). Awal mula pendidikan Al-Khairiyah lazim disebut pesantren salaf karena hanya mengajarkan ilmu-ilmu

¹⁷ Sya'labi, A (1995), *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid ke-2*, Jakarta: PT Al-Husna Zikra, hal.15

¹⁸ Mortimer, Edward (1984), *Islam dan Kekuasaan*, Penerjemah, Enna Hadi dan Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, hal.25

¹⁹ Al-Maraghi, lihat Surur, Thaha Abdul Baqi (1988), *Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam*, Penerjemah, LPMI, Solo: CV Pustaka Mantiq, hal.188

²⁰ Kamal, Mustafa dkk (1988), *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Persatuan Yogyakarta, hal.13

²¹ Lihat Mudzhar, H.M. Atho, *Perguruan Islam Al-Khairiyah Menatap Masa Depan*, Makalah, Sarasehan Himpunan Pemuda Al-Khairiyah, GSG Al-Khairiyah, Cilegon, 19 Februari 2005

agama. Di salafiyah masih menggunakan metode tradisional, yakni sorogan dan bandongan (wetonan, tanpa batasan umur dan waktu).

Lahirnya Al-Khairiyah sebagai sebuah pergerakan sosial keagamaan dapat dilihat dari kritik dimensional antara lain: *Pertama*, sebagai sebuah pesantren, Al-Khairiyah mengkritisi kegiatan belajar mengajar yang cenderung monoton sehingga Al-Khairiyah membuat terobosan integritas ilmu agama dengan ilmu umum dalam kegiatan belajar mengajarnya, juga memasukkan kurikulum filsafat yang pada saat itu tidak ada satu pesantren pun yang mengulas filsafat bahkan menentangnya dengan keras bahwa filsafat adalah sesat dan orang yang mempelajarinya dapat dikatakan kafir. *Kedua*, mendirikan koperasi Bumi Putra untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang pada saat itu sangat terpuruk karena adanya penindasan oleh kaum penjajah yang sangat mengkhawatirkan akan kelangsungan hidup masyarakat. *Ketiga*, Sebagai sebuah organisasi masyarakat, Al-Khairiyah terlibat langsung dalam dunia politik untuk menunjang kemerdekaan Republik Indonesia dengan mendirikan sebuah gerakan yang disebut *Nabdlatussubbanil Muslimin*. Sang pendiri, KH Syam'un terlibat langsung sebagai militer selevel dengan Soedirman yang pada saat itu masih berpangkat Brigadir Jenderal dan di tata pemerintahan pernah menduduki jabatan sebagai bupati pertama Serang. Demikian halnya gerakan sang pendiri diikuti oleh para alumni al-Khairiyah yang bergerak di dunia politik mulai dari yang menjadi panitia kemerdekaan RI sampai yang mejadi camat yang menjadi mayoritas di wilayah Banten. Al-Khairiyah menentang kejumudan dalam mempelajari ilmu agama dan al-Khairiyah juga menentang keras penjajahan di dunia, khususnya di Indonesia. Al-Khairiyah mendekatkan agama dengan kekuasaan. Orang yang beragama dengan baik adalah orang yang peduli dengan orang lain, utamanya adalah mereka yang hidup serba kekurangan. Adanya kekuasaan di tangan orang-orang yang beriman akan menjadi wakil yang dipercayai oleh orang-orang lemah baik dari segi ilmu, fisik, maupun finansial.

G. Kesimpulan

Puncak pencapaian Gerakan Sosial Al-Khairiyah dicapai pada masa kepemimpinan H. Ali Mujahidin. Step demi step dilalui dengan cepat dan nyaris sempurna sampai mencapai tahap institusional. Dua amanat Mu'tamar telah berhasil ditempuh yaitu menjadikan Brigjen KH Syam'un sebagai Pahlawan Nasional dan menjadikan Organisasi Massa Al-Khairiyah menjadi ORMAS Nasional. Pencapaian tersebut dapat berjalan dengan baik akibat dukungan dari Warga Al-Khairiyah. Namun, di sisi lain hal tersebut menjadi sebuah asset yang dapat membawa ketua umum menjadi pemimpin daerah di Cilegon.

H. Daftar Pustaka

- A. Hoogerwerf (1985), *Politikologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga
Al-Maraghi, lihat Surur, Thaha Abdul Baqi (1988), *Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam*, Penerjemah, LPMI, Solo: CV Pustaka Mantiq
Bakhtiar, Amsal (2007), *Filsafat Agama*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Perasada

- Betty R. Schaf (1995), *Kajian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Bowie, Fiona (2000), *Theories and Controversies, Antropologi of Religion*, Massachusetts: Blackwell Publisher
- Eller, Jack David (2007), *Introducing Anthropology of Religion: Culture to the Ultimate*, Oxon: Taylor & Francis
- Fakih, Mansoer (1996), *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fauzi, Noer (2005), *Memahami Gerakan–Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist Press
- Haynes, Jeyf (2000), *Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hidayat, Imam (2009), *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA press
- Kahmad, Dadang (2011), *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Ilmu
- Kamal, Mustafa dkk (1988), *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Persatuan Yogyakarta
- Martin, Roderick (1995), *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press
- Martono, Nanang (t.th), *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan poskolonial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Menzies, Allan (2014), *Sejarah Agama-agama*, Yogyakarta: Forum
- Misel, Robert (2004), *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta : Resist Book
- Mortimer, Edward (1984), *Islam dan Kekuasaan*, Penerjemah, Enna Hadi dan Rahmani Astuti, Bandung: Mizan
- Mudzhar, H.M. Atho, *Perguruan Islam Al-Khairiyah Menatap Masa Depan*, Makalah, Sarasehan Himpunan Pemuda Al-Khairiyah, GSG Al-Khairiyah, Cilegon, 19 Februari 2005
- Outhwaite, William Outhwaite (2008), *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Edisi ke-2*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Pulungan, Amalia dan Abimanyu, Royseptia (2005), *Bukan Sekedar Anti Globalisasi*, Jakarta: IGJ dan WALHI
- Putra, Fadhillah dkk (2006), *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*, Malang : PlaCID's dan Averroes Press
- Qorib, Muhammad, *Nyawa Agama tak Terbingga*, Suara Muhammadiyah, Edisi No.19 TH KE-98, 1-15 Oktober 2013
- Raharjo, M. Dawam (1999), *Intelektual Intelegensia dan perilaku politik Bangsa – Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan
- Sadikin (2004), *Perlawanan Petani dan Konflik Agraria Dalam Diskursus Gerakan Sosial*
- Salam, Abdus (1983), *Sains dan Dunia Islam*, Penerjemah, A.Baiquni, Bandung:Pustaka
- Situmorang, Abdul Wahab (2007), *Gerakan Sosial ; Studi Kasus Beberapa Perlawanan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara
- Sudarsono, Juwono (ed) (1976), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Jakarta: Gramedia

- Surur, Thaha Abdul Baqi (1988), *Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam*, Penerjemah, LPMI, Solo: CV Pustaka Mantiq
- Susanto, Astrid S dan Sunarto (1998), *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad Ke Dua Puluh Satu*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Sutrisno, Muji dan Putranto, Hendar (2005), *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius
- Sya'labi, A (1995), *Sejarah dan Kebudayaan Islam Jilid ke-2*, Jakarta: PT Al-Husna Zikra
- Terry F. Godlove, Jr (2004), *Teaching Durkheim*, New York: Oxford University Press
- Zubir, Zaiyardam (2002), *Radikalisme Kaum Terpinggir : Studi Tentang Ideologi, Isu , Strategi Dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta : Insist Press